

Daftar Isi

No.	Judul Berita	Media Sumber	Page
1.	HBA Maret 2025 Resmi Berlaku Jadi Patokan Harga Batu Bara Ekspor	dunia-energi.com	2
2.	DHE SDA 100% Berlaku Besok, Penambang Atur Ulang Strategi Bisnis	ekonomi.bisnis.com	5
3.	Merdeka Copper (MDKA) Lunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp764,95 miliar	katadata.co.id	7
4.	Freeport akan Kantongi Izin Relaksasi Ekspor Tembaga, ESDM Revisi Aturan Menteri	market.bisnis.com	9
5.	Respons PTBA soal Kewajiban Pakai HBA sebagai Acuan Ekspor Batu Bara	bloombergtechnoz.com	10
6.	Investasi Sektor Hilirisasi Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8%	liputan6.com	12

HBA Maret 2025 Resmi Berlaku Jadi Patokan Harga Batu Bara Ekspor

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) Maret 2025 sebagai patokan harga batu bara ekspor.

Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu Bara Acuan untuk Periode Pertama Bulan Maret Tahun 2025.

Melalui regulasi tersebut, harga batu bara acuan untuk ekspor akan ditetapkan sebanyak dua kali dalam satu bulan. Adapun HBA sesuai putusan ini berlaku sejak 1 Maret 2025.

"Menetapkan Harga Batubara Acuan yang selanjutnya disebut HBA untuk Periode Pertama Bulan Maret Tahun 2025 dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini," bunyi diktum kedua Kepmen ESDM 80.K/MB.01/MEM.B/2025, dikutip Senin (3/3/2025).

Harga batubara acuan di periode pertama Maret 2025 ini dipatok mulai dari USD 34,16 per ton hingga USD 128,24 per ton. HBA ini kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batubara (HPB) di waktu yang sama.

Berikut rincian Harga Batubara Acuan untuk periode pertama Maret 2025:

1. Batubara (6.322 GAR)

Harga: USD 128,24 per ton

Spesifikasi: HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26 persen, total sulphur 0,66 persen, dan ash 7,94 persen

2. Batubara I (5.300 GAR)

Harga: USD 82,66 per ton

Spesifikasi: HBA I dalam kesetaraan nilai kalor 5 epp kcal/kg GAR, total moisture 21,32 persen, total sulphur 0,75 persen, dan ash 6,04 persen

3. Batubara II (4.100 GR)

Harga: USD 50,70 per ton

Spesifikasi: HBA dalam kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73 persen, total sulphur 0,23 persen, dan ash 3,90 persen

4. Batubara III (3.400 GAR)

Harga: USD 34,16 per ton

Spesifikasi: HBA dalam kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 0,24 persen, total sulphur 0, persen, dan ash 3,88 persen

Ancam Batasi Ekspor

Penetapan HBA Maret 2025 ini dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sebagai ultimatum untuk membatasi ekspor batu bara Indonesia. Lantaran harga batu bara Indonesia terus mendapat tekanan di pasar global, padahal berkontribusi sangat besar untuk kebutuhan dunia.

Oleh karenanya, Kementerian ESDM menerbitkan aturan soal harga batu bara acuan. Itu akan jadi pedoman dalam transaksi batu bara di pasar global. Tujuannya, untuk mendongkrak harga batu bara Indonesia di pasar global. Lantaran harga komoditas tersebut kini terus merangsek turun.

Bahlil menegaskan, setiap perusahaan nantinya wajib tunduk terhadap regulasi tersebut. Jika tidak, yang bersangkutan nantinya bakal kena larangan ekspor.

"Kalau ada perusahaan yang tidak memenuhi itu, maka kami punya cara agar mereka bisa ikut. Bila perlu, kalau mereka enggak mau, kita tidak usah izinkan ekspornya," tegas Bahlil beberapa waktu lalu.

Menurut dia, batu bara Indonesia betul-betul berdampak masif, sistemik, dan terstruktur bagi kebutuhan dunia. Sebagai contoh, ia melampirkan data ekspor batu bara Indonesia per 2024 yang mencapai 555 juta ton.

Jumlah itu disebutnya sangat signifikan terhadap angka yang beredar di pasar batu bara, kurang lebih sekitar 1,2-1,5 miliar ton. "Kita menyuplai kurang lebih sekitar 555 juta ton. Itu sama dengan 30-35 persen dari konsumsi dunia," seru Bahlil.

Wajib Berdaulat Penuh

Bahlil menegaskan, Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar batu bara wajib berdaulat penuh terkait penentuan harga. Sehingga Indonesia tak perlu lagi manut dengan negara lain selaku konsumen.

"Masa harga batu bara kita dibuat lebih murah? Masa kita harga batu bara ditentukan oleh negara tetangga? Negara kita harus berdaulat untuk menentukan harga komoditas sendiri," ujar Bahlil.

Saat ini, Bahlil mencatat total ekspor batu baru sepanjang 2024 mencapai 555 juta ton. Ekspor batu bara RI konsisten mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir.

Dengan 2020 sebanyak 405 juta ton, 2021 sebanyak 435 juta ton, 2022 sebanyak 465 juta ton, dan 2023 sebanyak 518 juta ton.

Sumber: liputan6.com

DHE SDA 100% Berlaku Besok, Penambang Atur Ulang Strategi Bisnis

SEJUMLAH pengusaha telah melakukan persiapan guna mengimplementasikan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 100% paling singkat satu tahun yang berlaku besok, Sabtu (1/3/2025).

Persiapan tersebut termasuk mengatur ulang rencana anggaran biaya (RAB) hingga sejumlah proyek yang telah teken kontrak.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengungkapkan setiap perusahaan akan berbeda-beda dalam mengatur persiapan implementasi DHE SDA.

“Mengatur ulang itu semua, ada tambahan beban biaya, mungkin saja kita *enggak* tahu ya, ada perusahaan-perusahaan yang mungkin skala kecil yang beban keuangannya lagi lebih berat, ada beberapa proyek yang mungkin bisa di-*reschedule*,” kata Hendra saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

Bahkan, kata dia, sejumlah rencana investasi harus ditahan ketika perusahaan memiliki utang karena harus renegotiasi dengan para pembeli untuk mengatur ulang arus kas perusahaan. Dia menegaskan sejumlah eksportir telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kebijakan tersebut.

“Kan mereka sudah buat RAB, lalu masuk aturan [DHE SDA], mereka harus hitung lagi *nih*. Soalnya dana yang ini seribu [misalnya] kalau semua harus saya gunakan pinjamannya bagaimana. Ya lakukan negosiasi dengan pihak bank dalam hal ini tentu mereka lebih proaktif. Mereka yang diuntungkan jadi mereka yang proaktif menghubungi para eksportir,” tutur Hendra.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho menyatakan, secara administrasi, sejumlah perusahaan sudah mulai berkoordinasi dengan pihak perbankan yang menyediakan fasilitas layanan DHE SDA.

Hal ini dilakukan untuk persiapan fasilitas swap ke rupiah dan fasilitas kredit *back to back deposito*. Dengan demikian, ketika kebijakan DHE SDA berlaku besok, arus kas tetap lancar.

“Terkait *budgeting*, perusahaan menganggarkan *extra cost of fund* sekitar 2% untuk meng-cover biaya pinjaman *back-to-back deposito*, seandainya ada tambahan bunga atas pinjaman tersebut,” tutur Fathul.

Kepastian Administrasi

Plt Direktur Eksekutif APBI/ICMA Gita Mahyarani menilai dengan adanya sejumlah sosialisasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pelaksanaan DHE SDA dapat dijalankan eksportir dengan aman oleh pengusaha tambang. Hal ini karena sejumlah relaksasi yang diberikan pemerintah masih memberikan kemudahan bagi penambang. “Kalau untuk kesiapan, APBI siap karena selama ini DHE SDA yang sudah berjalan dan bukan hal baru. *Spirit*-nya juga untuk penguatan rupiah kan,” tutur Gita.

Hanya saja, Gita menekankan pemerintah perlu mempermudah perihal kepastian administrasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. “Saya *cuma* bilang kita perlu kepastian sama kemudahan dalam hal administrasi. Akan tetapi, itu kunci banget, *kenapa?* Jangan sampai nanti bank sentral sama bank-bank khusus penyimpanan *enggak* sinkron penyamaannya,” ucapnya.

“Namun, kembali lagi pastinya untuk beradaptasi pada satu perubahan itu butuh semua proses. Termasuk untuk yang biasanya kita menarik bisa rupiah semua. Ini kan harus ada proses di keuangan yang satu-satu pasti punya kendalanya sendiri-sendiri.”

Pemerintah akan segera menerapkan kewajiban untuk memasukkan dan menempatkan DHE SDA sebesar 100% paling singkat satu tahun yang berlaku per 1 Maret 2025.

Hal itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Beleid itu ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/2/2025). (mfd/wdh)

Sumber: bloombergtechnoz.com

Merdeka Copper (MDKA) Lunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp764,95 miliar

PT MERDEKA Copper Gold Tbk. (MDKA) melunasi pokok dan bunga keempat dari obligasi berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 seri A.

Jumlah pelunasan pokok dan pembayaran bunga keempat obligasi itu sebesar Rp764,95 miliar.

Sekretaris Perusahaan MDKA Adi Adriansyah Sjoekri mengatakan sumber pendanaan yang digunakan untuk melunasi pokok dan bunga keempat obligasi itu berasal dari dana yang diperoleh lewat penerbitan obligasi berkelanjutan V MDKA Tahap II 2025. Selain itu, perseroan turut menggunakan kas internal.

“Dengan dilakukan pelunasan atas pokok dan pembayaran bunga keempat obligasi tersebut maka seluruh kewajiban perseroan atas obligasi tersebut telah berakhir,” kata Adi lewat keterbukaan informasi, Minggu (2/3/2025).

Jumlah obligasi yang jatuh tempo pada 2 Maret 2025 itu terdiri dari pokok obligasi sebesar Rp750 miliar dan bunga keempat obligasi sebesar Rp14,95 miliar.

“Selanjutnya, tidak ada dampak material lain atas pelunasan pokok dan bunga keempat obligasi terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, MDKA menderita rugi US\$67,02 juta atau sekitar Rp1,03 triliun (asumsi kurs Rp15.384 per dolar AS) sepanjang periode Januari sampai dengan September 2024.

Berdasarkan Laporan Keuangan perseroan yang dirilis Rabu (18/12/2024), posisi rugi emiten tambang emas dan tembaga itu makin lebar dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya di level US\$23,77 juta.

MDKA membukukan pendapatan usaha sebesar US\$1,66 miliar atau sekitar Rp25,65 triliun.

Torehan itu melesat 42,5% dari pendapatan yang berhasil dikumpulkan MDKA pada periode yang sama tahun sebelumnya di level US\$1,17 miliar atau sekitar Rp18 triliun.

Pendapatan itu ditopang oleh segmen penjualan emas, perak, katoda tembaga dan turunan nikel seperti NPI, nikel matte dan limonit ke pihak ketiga. Perinciannya, penjualan domestik sebesar US\$1,03 miliar dan ekspor mencapai US\$641,85 juta.

Adapun, penjualan domestik dan ekspor pada 9 bulanan 2024 ini melesat signifikan dari catatan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing di angka US\$445,2 juta dan US\$725,74 juta.

Sebagian besar penjualan MDKA disalurkan untuk PT Indonesia Tshingshan Stainless Steel, dengan nilai transaksi US\$551,89 juta, PT CNGR Ding Xing New Energy sebesar US\$339,62 juta dan Precious Metals Global Markets (HSBC) senilai US\$190,84 juta.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan, beban pokok MDKA juga melambung 47,33% menjadi US\$1,54 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US\$1,05 miliar.

Beban terbesar disumbang oleh biaya pengolahan sebesar US\$1,15 miliar, disusul oleh biaya pertambangan sebesar US\$124,57 juta, biaya penyusutan US\$104,21 juta, biaya amortasi sebesar US\$36,51 juta dan biaya pemurnian sebesar US\$1 juta.

Alhasil laba kotor tercatat sebesar US\$118,15 juta atau setara Rp1,81 triliun, cenderung susut dari pencatatan periode yang sama tahun sebelumnya di level US\$118,6 juta.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca. Editor : Rio Sandy Pradana

Sumber: market.bisnis.com

Freeport akan Kantongi Izin Relaksasi Ekspor Tembaga, ESDM Revisi Aturan Menteri

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan mengeluarkan persetujuan izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT. Freeport Indonesia (PTFI). Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut, izin ini akan berbentuk revisi peraturan Menteri (Permen) ESDM.

“Kami sedang harmonisasi Permen, sedang antri di Kementerian Hukum,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (28/2).

Dadan mengatakan Permen ini harus dikeluarkan agar PTFI bisa kembali mengeksport konsentrat tembaga. “Secara inti revisi Permen yang lama karena kondisi kahar, itu saja,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya sepakat memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga kepada PTFI. Keputusan ini berdasarkan hasil pengecekan dari sisi asuransi dan kepolisian yang menyatakan kebakaran fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PTFI merupakan keadaan kahar.

“Atas dasar itu pemerintah melalui ratas memutuskan untuk memperpanjang ekspor Freeport sampai smelter yang rusak itu selesai, bulan Juni,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (21/2).

Ia telah meminta Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai yang dinotariskan. Surat tersebut berisi pernyataan jika sampai Juni smelter belum selesai diperbaiki maka PTFI akan mendapatkan sanksi. “Diberikan sanksi, eksportnya juga akan kami berikan (persentase) pajak yang maksimal,” ujarnya. Bahlil tidak merincikan besaran pajak yang akan dikenakan PTFI ketika bisa mengantongi izin ekspor. Namun dia menjamin, pemerintah akan menerapkan tarif pajak maksimal untuk hal ini.

Terkait besaran ekspor, pemerintah saat ini belum membuat keputusan. Besaran volume, Bahlil mengatakan, akan dihitung berdasarkan total konsentrat yang ada di Freeport. Editor: Agustiyanti

Sumber: katadata.co.id

Respons PTBA soal Kewajiban Pakai HBA sebagai Acuan Ekspor Batu Bara

PT BUKIT Asam Tbk (PTBA) berharap penetapan harga batu bara acuan (HBA) sebagai acuan ekspor batu bara dapat menjaga daya saing di pasar Internasional.

Hal ini merespons pemerintah yang mewajibkan eksportir emas hitam menggunakan HBA sebagai dasar penjualan di pasar global mulai 1 Maret 2025. Corporate Secretary PTBA Niko Chandra mengatakan, Perseroan mendukung kebijakan tersebut.

"Terkait HBA, PTBA berharap agar penetapan HBA tetap dapat menjaga daya saing industri batu bara Indonesia di pasar internasional," kata Niko kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, kebijakan pemerintah itu memiliki niat baik. Niko menilai kebijakan penggunaan HBA untuk acuan ekspor bertujuan menstabilkan harga batu bara di pasar global.

"PTBA mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan harga batu bara, melindungi kepentingan nasional, serta mengoptimalkan pendapatan negara," katanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan pemerintah mewajibkan eksportir batu bara menggunakan HBA sebagai dasar penjualan di pasar global mulai 1 Maret 2025. Dia pun menyebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para eksportir emas hitam tersebut.

"[Aturan akan berbentuk] Kepmen [Keputusan Menteri]. [Berlaku] 1 Maret," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).

Dia menjelaskan, harga batu bara RI untuk ekspor masih menggunakan acuan dari negara lain. Menurut Bahlil, hal ini cukup merugikan. Sebab, terkadang batu bara Indonesia dihargai lebih murah dibanding negara lain.

"Nah, kita ini kan harus punya independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain harganya rendah. Aku enggak mau itu," kata Bahlil.

Selama ini, kebanyakan pembeli batu bara dari Indonesia mengacu pada Indonesia Coal Index (ICI). Indeks harga ini merupakan acuan harga mingguan batu bara Indonesia di pasar domestik dan internasional yang disusun oleh PT Coalindo Energy dan Argus Media, lembaga pricing dari Inggris.

Sementara itu, HBA ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap bulannya dan digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan tarif royalti dan harga jual batu bara. Editor : Denis Riantiza

Meilanova

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Investasi Sektor Hilirisasi Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8%

PENINGKATAN investasi melalui hilirisasi menjadi kunci utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mencapai 5%. Capaian ini dinilai belum optimal mengingat Indonesia telah memiliki keuntungan bonus demografi dalam 12 tahun terakhir.

“Mungkin ada sesuatu yang belum optimal dari struktur ekonomi kita, sehingga harus ada nilai tambah antara lain dari hilirisasi dan industrialisasi,” kata Eddy belum lama ini di Jakarta.

Menurutnya konsumsi masyarakat selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 60%.

Meski demikian, segmen konsumsi masyarakat saja belum akan cukup sehingga diperlukan adanya investasi dan ekspor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Indonesia yang punya keunggulan sumber daya alam khususnya raw material mineral dan batu bara dinilai berpeluang untuk mendongkrak nilai tambah dan memperkuat pasar ekspor.

“Harus ada peningkatan investasi agar kita kemudian bisa menciptakan nilai tambah dari aspek hilirisasi. Setelah itu bisa kita ekspor, paling tidak kita sudah bisa memproduksi sendiri, mensubstitusi impor yang selama ini kita lakukan,” jelas Eddy.

Dilo Seno Widagdo, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID mengungkapkan, industri pengolahan dan logam pertambangan memiliki kontribusi signifikan pada raihan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 12%.

“Artinya ini memang salah satu sektor yang menarik buat investor untuk masuk. MIND ID memang ada di sektor ini dan nanti punya peran untuk bisa menarik investor masuk ke Indonesia supaya mendorong investasi lebih masif,” kata Dilo.

Dilo menambahkan, sebagai pemegang mandat hilirisasi, MIND ID mendorong peningkatan nilai tambah pada seluruh komoditas mineral dan batu bara. Apalagi, total Foreign Direct Investment (FDI) ke sektor pengolahan logam dan pertambangan mencapai 28% pada tahun 2024.

Dalam mendorong peningkatan nilai tambah, roadmap pengembangan mineral kritis dan strategis menjadi salah satu aspek penting. MIND ID pun juga terus memperkuat pasar untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan baik di dalam negeri maupun pasar ekspor.

“Jadi kita nanti mungkin juga akan bersama-sama dengan mitra untuk bisa menyelesaikan. Tugas kita tidak hanya berhenti di hilirisasi midstream tapi industrialisasi manufaktur sampai produk akhir,” tegas Dilo.

Grup MIND ID kini tengah berfokus melaksanakan sejumlah proyek hilirisasi antara lain Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), proyek smelter tembaga dan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik, Jawa Timur oleh PT Freeport Indonesia.

Proyek lainnya yakni proyek nikel di Halmahera Timur, yang mencakup pembangunan smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) untuk memproduksi nikel serta fasilitas High-Pressure Acid Leach (HPAL) untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. (RI)

Sumber: dunia-energi.com